BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Perusahaan BUMN

Berikut ini adalah sejarah singkat 6 Perusahaan BUMN yang terdiri atas perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan manufaktur:

1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

Pada tahun 1975 merupakan awal perjalanan usaha PT Infomedia Nusantara menjadi perusahaan pertama penyedia layanan informasi telepon di Indonesia. Di bawah sub divisi Elnusa GTDI dari anak perusahaan Pertamina, Infomedia telah menerbitkan Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages. Perkembangan yang tercatat selanjutnya adalah berdirinya PT Elnusa Yellow Pages di tahun 1984 yang berubah nama di tahun 1995 menjadi PT Infomedia Nusantara pada saat PT Telkom Tbk menanamkan investasi. Untuk mendukung implementasi *Good Coorporate Governance* dalam setiap aspek kegiatan

perusahaan, Infomedia telah mengeluarkan kebijakan pedoman tata kelola perusahaan di tahun 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2009 PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) melalui PT Multimedia Nusantara (Metra), anak perusahaan yang 99,99% milik Telkom (selanjutnya disebut Telkom Group) telah menandatangani *Shares Sales & Purchase Agreement* (SPA) untuk membeli 49% saham PT Infomedia Nusantara (Infomedia) milik PT Elnusa Tbk (Elnusa), sehingga 100% saham PT Infomedia Nusantara telah dimiliki oleh Telkom Group.

2. PT. INTI (Persero)

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disingkat INTI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 dasawarsa berperan sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional yang diselenggarakan oleh PT Telkom dan Indosat. Berpusat di Bandung dengan 695 orang karyawan tetap (posisi Maret 2009), INTI (PT Industri Telekomunikasi Indonesia) telah berkiprah dalam bisnis telekomunikasi selama 35 tahun. Pelanggan utama INTI antara lain adalah "*THE BIG FOUR*" operator telekomunikasi di Indonesia; Telkom, Indosat, Telkomsel dan XL.

Sejak berkembangnya tren konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (IT), INTI telah melakukan perubahan orientasi bisnis dari yang semula berbasis pure manufacture menjadi sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi. INTI menangani solusi dan layanan integrasi jaringan tetap maupun

seluler, konten IT, seat management serta mengembangkan produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System).

3. PT. Kereta Api Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1045, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam *Angkatan Moeda Kereta Api* (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya *Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia* (DKARI).

Nama DKARI kemudian diubah menjadi *Perusahaan Negara Kereta Api* (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi *Perusahaan Jawatan Kereta Api* (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi *Perusahaan Umum Kereta Api* (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* sampai sekarang

4. PT. Kimia Farma Tbk Bandung

Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat.

5. PT. PINDAD Bandung

Pada era kolonial yaitu pada tahun 1808 didirikan sebuah bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama *Artillerie Constructie Winkel* (ACW), bengkel ini berkembang menjadi sebuah pabrik dan sesudah mengalami perubahan nama pengelola kemudian dipindahkan lokasinya ke Bandung pada tahun 1923. Pemerintah Belanda pada tahun 1950 menyerahkan pabrik tersebut kepada Pemerintah Indonesia, kemudian pabrik tersebut diberi nama Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang berlokasi di PT. PINDAD sekarang ini.

Sejak saat itu PT. PINDAD berubah menjadi sebuah industri alat peralatan militer yang dikelola oleh Angkatan Darat. PT. PINDAD berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT. PINDAD (Persero) pada tanggal 29 April 1983, kemudian pada tahun 1989 perusahaan ini berada di bawah pembinaan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi PT. Pakarya Industri (Persero) dan kemudian berubah lagi namanya menjadi PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero). Tahun 2002 PT. BPIS (Persero) dibubarkan oleh Pemerintah, dan sejak itu PT. PINDAD beralih status menjadi PT. PINDAD (Persero) yang langsung berada dibawah pembinaan Kementerian BUMN.

6. PT. PLN Bandung

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

Beberapa peristiwa terbentuknya PT. PLN (Persero) siantaranya adalah Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit

tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Pada tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan BUMN

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, ayat (2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ spesifik. Organ-organ tersebut diantaranya adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris

4.1.3 Uraian Tugas Perusahaan BUMN

Uraian tugas untuk perusahaan BUMN adalah sebagai berikut:

1. RUPS

   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum. Kewenangan RUPS untuk menetapkan kebijaksanaan umum PT dapat disimpulkan dari bunyi rumusan pasal 63Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 1995. Disana dikatakan bahwa RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, dalam Batas yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar/Akte Pendirian. Sedangkan kekuasaan RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris terdapat dalam rumusan pasal 80, 91, 95 dan 1001.

2. Direksi

   Direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT Pasal 2 Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Penegasan Pasal di atas sama dengan yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 13 , Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.

3. Komisaris

   Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1ayat (5) UU No.1 Tahun 1995 tentang PT bahwa, Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Selanjutnya penegasan tersebut juga identik dengan penegasan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003tentang BUMN Pasal 1 ayat (7) bahwa, Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

4.1.4 Aktivitas Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1.

BUMN berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti: Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya perusahaan BUMN menyelenggarakan fungsi ialah sebagai berikut:

4.1 Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.

4.2 Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang jasa/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

4.3 BUMN bertujuan sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 96 responden. Untuk variabel X *Corporate Social Responsibility* dan variable Y *Tax Planning,* kuesioner diberikan kepada objek yaitu bagian keuangan dan bagian CSR perusahaan BUMN. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	81	84,38%
Perempuan	15	15,62%
Jumlah	96	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang atau sebesar 84,38% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang atau sebesar 15,62%.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
<30 Tahun	18	18,75%
31-40 Tahun	49	51,05%
41-50 Tahun	29	30,20%
>50 Tahun	0	0%
Jumlah	96	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia di bawah 30 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 18,75%, 31-40 tahun berjumlah 49 orang atau sebesar 51,05%, 41-50 tahun berjumlah 29 orang atau sebesar 30,20%, Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	18	18,75%
Diploma III	40	41,67%
Strata I (S1)	26	27,08%
Strata II (S2)	12	12,50%
Jumlah	96	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 18 orang atau sebesar 18,75%, Diploma III (D3) sebanyak 40 orang atau sebesar 41,67%, responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 26 orang atau sebesar 27,08% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 26 orang atau sebesar 12,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Diploma III (D3).

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	5	5,21%
1– 5 Tahun	39	40,62%
5 – 10 Tahun	46	47,92%
>10 Tahun	6	6,25%
Jumlah	96	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja di bawah 1 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 5.21%, responden dengan lama kerja 1–5 tahun sebanyak 39 orang atau sebesar 40.62% dan responden dengan lama kerja 5–10 tahun sebanyak 46 orang atau sebesar 47.92%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6.25%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada Unit BUMN Di Bandung

4.3.1.1 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 30 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	326	93.1	Sangat Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	389	97.3	Sangat Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	433	96.2	Sangat Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	292	97.3	Sangat Baik
Total		**1500**	**1440**	**96.0**	**Sangat Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.4 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{326}{30x5x10} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1440}{1500} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 96{,}0\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 93.1% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 93.7% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai akrual dengan persentase 96.2% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 97.3% yang menunjukkan kriteria sangat baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung memperoleh persentase sebesar 96.0% yang menunjukkan kriteria sangat baik.

4.3.1.2 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. INTI (Persero) Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. INTI (Persero) Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 30 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. INTI (Persero) Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	**Skor Akrual**	**%**	**Kriteria**
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	252	72.0	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	277	69.3	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	314	69.9	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	207	69.0	Baik
Total		**1500**	**1050**	**70.0**	**Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.5 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1050}{30x5x10} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1050}{1500} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 70{,}0\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 72.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.8% yang menunjukkan kriteria baik, untuk

dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.0% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. INTI (Persero) Bandung memperoleh persentase sebesar 70.0% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.1.3 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Kereta Api Indonesia Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. Kereta Api Indonesia Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 30 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. Kereta Api Indonesia Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	243	69.4	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	277	69.3	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	312	69.3	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	218	72.7	Baik
Total		**1500**	**1050**	**70.0**	**Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1050}{30x5x10} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1050}{1500} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 70{,}0\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.4% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 72.7% yang menunjukkan kriteria cukup baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. Kereta Api Indonesia Bandung memperoleh persentase sebesar 70.0% yang menunjukkan kriteria cukup baik.

4.3.1.4 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Kimia Farma Tbk Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 30 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	269	76.9	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	303	75.8	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	331	73.6	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	227	75.7	Baik
Total		**1500**	**1130**	**75.3**	**Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1130}{30x5x10} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1130}{1500} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 75{,}3\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.9% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi

CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.8% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.7% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung memperoleh persentase sebesar 75.3% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.1.5 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. PINDAD Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. PINDAD Bandung diperoleh data statistik nilai total skor jawaban responden yang berjumlah 30 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. PINDAD Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	252	72.0	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	288	72.0	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	313	69.6	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	217	72.3	Baik
Total		**1500**	**1070**	**71.3**	**Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1070}{30x5x10} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1070}{1500} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 71{,}3\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 72.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 72.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai akrual dengan persentase 69.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 72.3% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung memperoleh persentase sebesar 71.3% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.1.6 Deskripsi *Corporate Social Responsibility* pada PT. PLN Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 karyawan bagian *Corporate Social Responsibility* di PT. PLN Bandung diperoleh data

deskriptif responden yang berjumlah 25 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Deskriptif *Corporate Social Responsibility* di PT. PLN Bandung

No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	**Skor Akrual**	**%**	**Kriteria**
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	275	78.6	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	311	77.8	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	350	77.8	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	234	78.0	Baik
Total		**1500**	**1170**	**78.0**	**Baik**

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1170}{30x5x10} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{1170}{1500} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 78{,}0\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi memperoleh nilai akrual dengan persentase 78.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup memperoleh nilai akrual dengan persentase 77.8% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu sosial memperoleh nilai

akrual dengan persentase 77.8% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi CSR pada landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan memperoleh nilai akrual dengan persentase 78.0% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung memperoleh persentase sebesar 78.0% yang menunjukkan kriteria baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas mengenai *Corporate Social Responsibility* pada enam perusahaan tersebut, maka untuk mengetahui kategori mengenai *Corporate Social Responsibility* setiap perusahaan dengan mengambil nilai rata-rata setiap perusahaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Persentase Rata-Rata Tiap Perusahaan

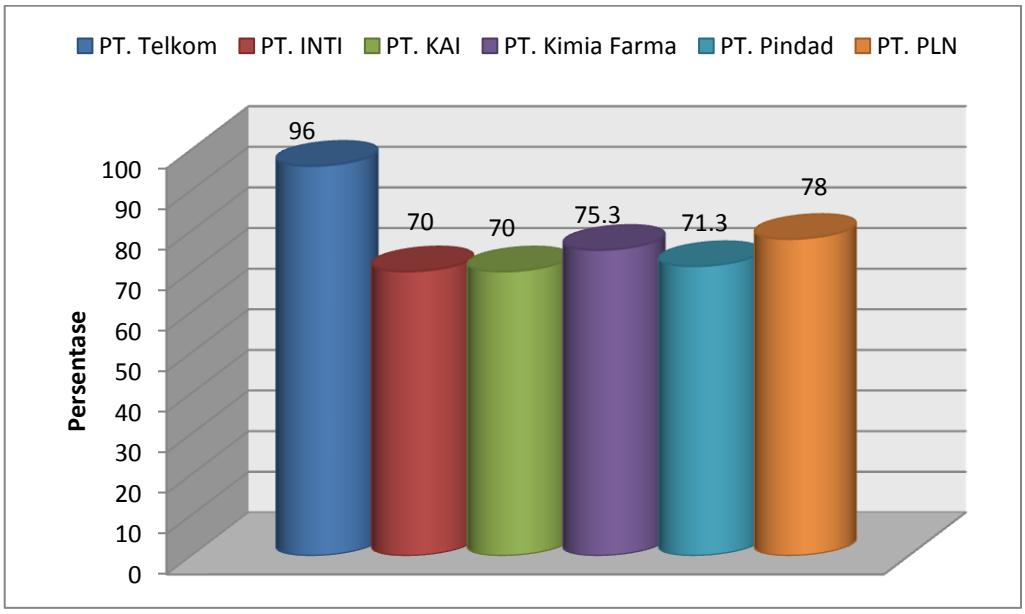
No	Dimensi CSR	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi	350	275	78.6	Baik
2	Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup	400	311	77.8	Baik
3	Landasan pokok CSR dalam isu sosial	450	350	77.8	Baik
4	Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan	300	234	78.0	Baik
Total		**1500**	**1170**	**78.0**	**Baik**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rata-rata PT. Telkom sebesar 96.0% yang termasuk dalam kategori sangat baik, persentase rata-rata PT. INTI sebesar 70.0% yang termasuk dalam kategori baik, persentase rata-

rata PT. KAI sebesar 70.0% yang termasuk dalam kategori baik, persentase rata-rata PT. Kimia Farma sebesar 75.33% yang termasuk dalam kategori baik, persentase rata-rata PT. PINDAD sebesar 71.33% yang termasuk dalam kategori baik dan persentase rata-rata PT. PLN sebesar 78.0% yang termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, keenam perusahaan BUMN yang berada di Bandung mempunyai persentase rata-rata sebesar 76.8% yang termasuk kategori baik. Untuk melihat lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4.1

Persentase Rata-Rata Tiap Perusahaan



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung mempunyai nilai tertinggi pada *Corporate Social Responsibility*, sedangkan PT. INTI (Persero) Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mempunyai nilai terendah pada *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung

mempunyai nilai tertinggi pada *Corporate Social Responsibility* artinya PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung sangat baik dalam mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksi dengan *stakeholders*nya, sedangkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mempunyai nilai terendah pada *Corporate Social Responsibility* artinya PT. Kereta Api Indonesia (KAI) artinya dalam mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksi dengan *stakeholders*nya lebih kurang baik daripada PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung.

Keberadaan dan ketergantungan perusahaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan menuntut peran serta perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini diantaranya tanggung jawab ekonomi perusahaan seperti menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya yang layak dan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja dan membayar pajak untuk pemerintah, tanggung jawab hukum yang mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis, tanggung jawab etika yang mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak dan tanggung jawab diskresi yang mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh (Pearce Robinson, 2007;72-73).

4.3.2 Analisis Deskripsi *Tax Planning* pada Unit BUMN di Bandung

4.3.2.1 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	55	91.7	Sangat Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	141	94.0	Sangat Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	85	94.4	Sangat Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	87	96.7	Sangat Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	29	96.7	Sangat Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	28	93.3	Sangat Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	28	93.3	Sangat Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	29	96.7	Sangat Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	28	93.3	Sangat Baik
Total		**540**	**510**	**94.4**	Sangat Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{510}{18x5x6} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{510}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 94{,}4\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan memperoleh nilai akrual dengan persentase 91.7% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 94.0% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 94.4% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 96.6% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 96.7% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 93.3% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 93.3% yang menunjukkan kriteria sangat baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 96.7% yang menunjukkan kriteria sangat baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 93.3% yang menunjukkan

kriteria sangat baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning* di PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung memperoleh persentase sebesar 94.4% yang menunjukkan kriteria sangat baik.

4.3.2.2 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. INTI (Persero) Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. INTI (Persero) Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. INTI (Persero) Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	45	75.0	Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	112	74.7	Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	66	73.3	Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	68	75.6	Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	22	73.3	Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	20	66.7	Cukup Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	23	76.7	Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	23	76.7	Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	23	76.7	Baik
Total		**540**	**402**	**74.4**	Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{402}{18x5x6} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{402}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 74{,}4\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 74.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 66.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning* di PT. INTI (Persero) Bandung memperoleh persentase sebesar 74.4% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.2.3 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. Kereta Api Indonesia Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. Kereta Api Indonesia Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. Kereta Api Indonesia Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	**Skor Akrual**	**%**	**Kriteria**
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	43	71.7	Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	112	74.7	Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	61	67.8	Cukup Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	66	73.3	Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	23	76.7	Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	22	73.3	Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	22	73.3	Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	20	66.7	Cukup Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	21	70.0	Baik
Total		**540**	**390**	**72.2**	Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{390}{18x5x6} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{390}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 72{,}2\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan memperoleh nilai akrual dengan persentase 71.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 74.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 67.8% yang menunjukkan kriteria cukup baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 66.7% yang menunjukkan kriteria cukup baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 70.0% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning*

di PT. Kereta Api Indonesia Bandung memperoleh persentase sebesar 72.2% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.2.4 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. Kimia Farma Tbk Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. Kimia Farma Tbk Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	**Skor Akrual**	**%**	**Kriteria**
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	43	71.7	Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	106	70.7	Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	64	71.1	Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	64	71.1	Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	21	70.0	Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	22	73.3	Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	20	66.7	Cukup Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	22	73.3	Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	22	73.3	Baik
Total		**540**	**384**	**71.1**	Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{384}{18x5x6} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{384}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 71.1\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan memperoleh nilai akrual dengan persentase 71.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 70.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 71.1% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 71.1% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 70.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 66.7% yang menunjukkan kriteria cukup baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning* di PT. Kimia Farma Tbk Bandung

memperoleh persentase sebesar 71.1% yang menunjukkan kriteria sangat baik.

4.3.2.5 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. PINDAD Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. PINDAD Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. PINDAD Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	Skor Akrual	%	Kriteria
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	45	75.0	Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	116	77.3	Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	68	75.6	Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	68	75.6	Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	22	73.3	Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	23	76.7	Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	22	73.3	Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	22	73.3	Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	22	73.3	Baik
Total		**540**	**408**	**75.6**	Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{408}{18x5x6} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{408}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 75{,}6\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 77.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 75.6% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning* di PT. PINDAD Bandung memperoleh persentase sebesar 75.6% yang menunjukkan kriteria baik.

4.3.2.6 Deskripsi *Tax Planning* pada PT. PLN Bandung

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 6 karyawan bagian *Tax Planning* di PT. PLN Bandung diperoleh data deskriptif responden yang berjumlah 18 pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17

Deskriptif *Tax Planning* pada PT. PLN Bandung

No	Dimensi *Tax Planning*	Data Primer			
		Skor Ideal	**Skor Akrual**	**%**	**Kriteria**
1	Memahami dan menerapkan peraturan perpajakan	60	48	80.0	Baik
2	Menentukan hasil (*outcome*)	150	114	76.0	Baik
3	Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang	90	71	78.9	Baik
4	Menyusun laporan keuangan	90	70	77.8	Baik
5	Menerapkan teknik transformasi	30	24	80.0	Baik
6	Penyimpanan arsip-arsip	30	23	76.7	Baik
7	Pembayaran pajak terutang tepat waktu	30	27	80.0	Baik
8	Penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu	30	22	73.3	Baik
9	Menghindari pemeriksa pajak	30	24	80.0	Baik
Total		**540**	**420**	**77.8**	Baik

Berdasarkan total skor akrual pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan perusahaan terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{420}{18x5x6} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = \frac{420}{540} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan perusahaan} = 77{,}8\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk dimensi *tax planning* pada memahami dan menerapkan peraturan perpajakan

memperoleh nilai akrual dengan persentase 80.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menentukan hasil (*outcome*) memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada melakukan analisis terhadap kondisi sekarang memperoleh nilai akrual dengan persentase 78.9% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menyusun laporan keuangan memperoleh nilai akrual dengan persentase 77.8% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada menerapkan teknik transformasi memperoleh nilai akrual dengan persentase 80.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada pembayaran pajak terutang tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 76.7% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyimpanan arsip-arsip memperoleh nilai akrual dengan persentase 80.0% yang menunjukkan kriteria baik, untuk dimensi *tax planning* pada penyampaian surat pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu memperoleh nilai akrual dengan persentase 73.3% yang menunjukkan kriteria baik dan untuk dimensi *tax planning* pada menghindari pemeriksa pajak memperoleh nilai akrual dengan persentase 80.0% yang menunjukkan kriteria baik. Secara keseluruhan, *Tax Planning* di PT. PLN Bandung memperoleh persentase sebesar 77.8% yang menunjukkan kriteria sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas mengenai *Tax Planning* pada enam perusahaan tersebut, maka untuk mengetahui kategori

mengenai *Tax Planning* setiap perusahaan dengan mengambil nilai rata-rata setiap perusahaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18

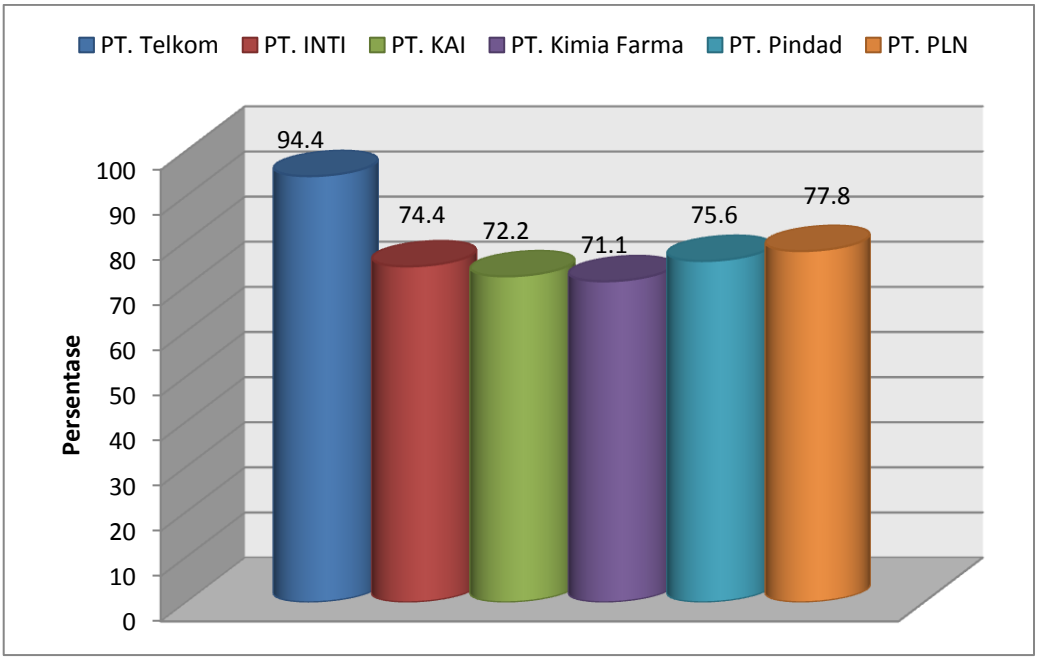
Persentase Rata-Rata Tiap Perusahaan

Perusahaan	Persentase Rata-Rata Jawaban	Keterangan
PT. Telkom	94.4	Sangat Baik
PT. INTI	74.4	Baik
PT. KAI	72.2	Baik
PT. Kimia Farma	71.1	Baik
PT. PINDAD	75.6	Baik
PT. PLN	77.8	Baik
Total Rata-Rata	**77.6**	**Baik**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rata-rata PT. Telkom sebesar 94.4% yang termasuk dalam kategori sangat baik, persentase rata-rata PT. INTI sebesar 74.4% yang termasuk dalam kategori baik, persentase rata-rata PT. KAI sebesar 72.2% yang termasuk dalam kategori baik, persentase rata-rata PT. Kimia Farma sebesar 71.1% yang termasuk dalam kategori sangat baik, persentase rata-rata PT. PINDAD sebesar 75.6% yang termasuk dalam kategori baik dan persentase rata-rata PT. PLN sebesar 77.8% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan, *tax planning* pada keenam BUMN di Badnung memperoleh persentase rata-rata sebesar 77.6% yang termasuk dalam kategori baik. Untuk melihat lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4.2

Persentase Rata-Rata Tiap Perusahaan



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk PT. Kimia Farma mempunyai nilai terendah pada *Tax Planning*, sedangkan untuk PT. telekomunikasi Indonesia (Telkom) mempunyai nilai tertinggi pada *Tax Planning*. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung mempunyai nilai tertinggi pada *Tax Planning* artinya perusahaan sangat baik dalam upaya untuk mengatur pembayaran pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar berada pada posisi seminimal mungkin, sedangkan PT. Kimia Farma Bandung mempunyai nilai terendah pada *Tax Planning* artinya perusahaan dalam upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar berada pada posisi

seminimal mungkin masih kurang baik daripada kelima perusahaan BUMN yang lain.

Tax Planning yang dilakukan oleh setiap perusahaan adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial artinya tidak melanggar ketentuan hukum atau ilegal yang disebut dengan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Untuk itu, dalam pelaksanaan *tax planning*, perusahaan harus mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait karena jika dipaksakan melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan *tax planning*. Selain itu, adanya kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai, seperti adanya faktur, perjanjian, dan lain sebagainya (Suandy, 2001;10).

4.3.3 Analisis Deskripsi Beban Pajak Unit BUMN di Bandung

Untuk mengetahui besarnya beban pajak setiap perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung, PT. INTI (Persero) Bandung, PT. Kereta Api Indonesia Bandung, PT. Kimia Farma Tbk Bandung dan PT. PINDAD Bandung diperoleh dari data laporan keuangan tiap perusahaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19

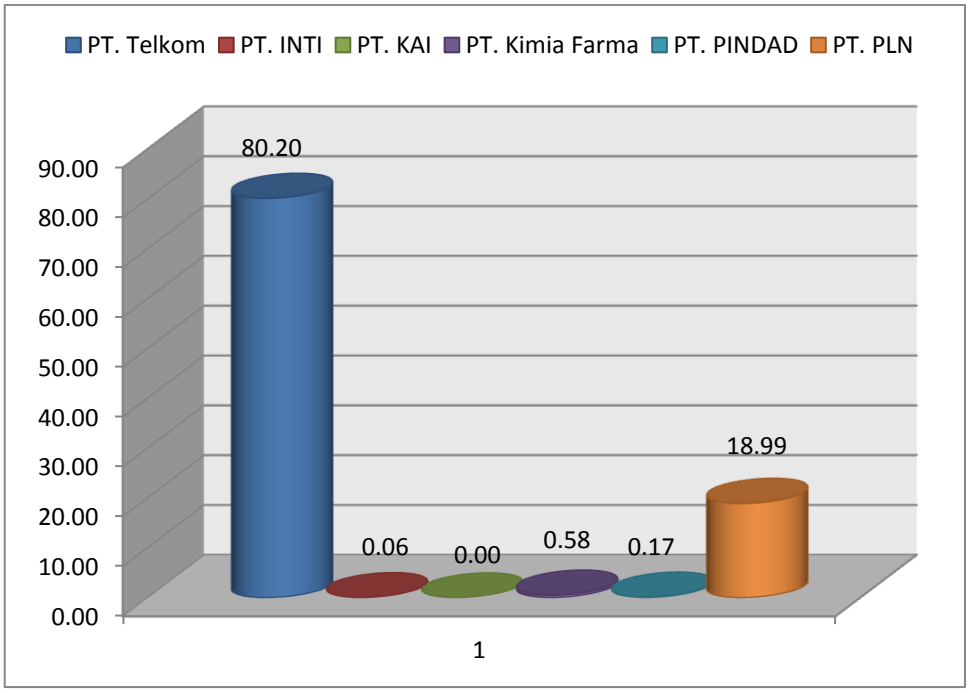
Beban Pajak Perusahaan (2010)

Perusahaan	Beban Pajak (Rupiah)
PT. Telkom	5,546,039,000,000.00
PT. INTI	
PT. KAI	
PT. Kimia Farma	39,895,000,000.00
PT. PINDAD	
PT. PLN	1,313,174,000,000.00
Total	6,914,957,003,000.00

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Bandung mempunyai beban pajak sebesar Rp. 5,546,039,000,000.00, PT. INTI (Persero) Bandung mempunyai beban pajak sebesar , PT. Kereta Api Indonesia Bandung tidak mempunyai beban pajak sebesar . , PT. Kimia Farma Bandung mempunyai beban pajak sebesar Rp. 39,895,000,000.00, PT. PINDAD Bandung mempunyai beban pajak sebesar Rp. , sedangkan PT. PLN mempunyai beban pajak sebesar Rp. 1,313,174,000,000.00. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Bandung) mempunyai beban pajak tertinggi, sedangkan PT. Kereta Api Indonesia mempunyai beban pajak terendah dari keenam BUMN tersebut. Adapun total dari keseluruhan untuk keenam perusahaan BUMN tersebut sebesar Rp. 6,914,957,003,000.00. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 4.3

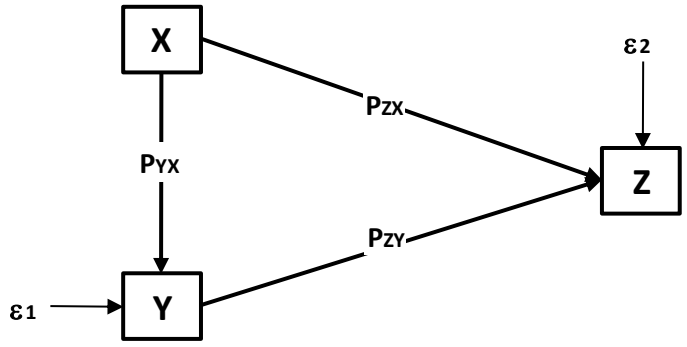
Persentase Beban Pajak Perusahaan BUMN di Bandung



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui, bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) mempunyai beban pajak yang cukup tinggi sebesar 80.20% dari kelima perusahaan lain, sedangkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tidak mempunyai beban pajak (0.0%) dari keenam perusahaan BUMN ini. Ini membuktikan bahwa PT. telekomunikasi Indonesia (Telkom) pada tahun BUMN membukukan keuntungan yang cukup besar, sehingga berimbas pada beban pajak yang besar juga, sedangkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) membukukan kerugian dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak ada beban pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan (Waluyo, 215 ; 2008).

4.4 Analisis Verifikatif

Semakin baik penerapan *corporate social responsibility* diharapkan meningkatkan penerapan *Tax Planning* sehingga Beban Pajak diharapkan juga dalam posisi seminimal mungkin. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* dan implikasinya terhadap Beban Pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning*, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh *corporate social responsibility* dan penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Z = Beban Pajak
Y = Penerapan *Tax Planning*
X = *Corporate social responsibility*
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur *Corporate social responsibility* terhadap *Tax Planning*
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur *Corporate Social Responsibility* terhadap Beban Pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur *Tax Planning* terhadap Beban Pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* dan implikasinya terhadap Beban Pajak terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut:

Tabel 4.20
Rekap Data Variabel X, Y, dan Z Untuk Perhitungan Analisis Jalur

perusahaan	X	Y	Z	X^2	Y^2	Z^2	XY	XZ	YZ
1	115,135	57,41	80,20	13256,0682	3295,9081	64320400	6609,90035	923382,7	460428,2
2	71,596	34,53	0,06	5125,98722	1192,3209	36	2472,20988	429,576	207,18
3	70,496	32,17	0,00	4969,68602	1034,9089	0	2267,85632	0	0
4	80,384	30,85	0,58	6461,58746	951,7225	3364	2479,8464	4662,272	1789,3
5	73,479	35,87	0,17	5399,16344	1286,6569	289	2635,69173	1249,143	609,79
6	85,244	38,52	18,99	7266,53954	1483,7904	3606201	3283,59888	161878,356	73149,48
Σ	496,334	229,35	100,00	42479,0319	9245,3077	67930290	19749,10356	1091602,047	536183,95

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan *software* SPSS

17 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4.21

Kategori Korelasi Metode Guilford

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat longgar, dapat diabaikan
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Moderat / Cukup
0,61 – 0,80	Erat
0,81 – 1,00	Sangat erat

Umi Narimawati (2010:52)

4.4.1 Keterkaitan Antar Variable

Variabel bebas pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (X), variabel intervening penerapan *Tax Planning* (Y) dan variabel dependen Beban Pajak (Z), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[(n\sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6\times(19749{,}10356) - (496{,}334\times229{,}35)}{\sqrt{\left[(6\times 42479{,}0319 - (496{,}334)^2)\times(6\times9245{,}3077 \quad -(229{,}35)^2\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{(118494{,}62136) - (113834{,}2029)}{\sqrt{[(254874{,}1914 - 246347{,}439556)\times(55471{,}8462 - 52601{,}4225)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{4660{,}41846}{\sqrt{8526{,}751844 \times 2870{,}4237}}$$

$$r_{xy} = \frac{4660{,}41846}{4947{,}260916611969}$$

r_{xy} = 0,942

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara *Corporate Social Responsibility* (X) dengan penerapan *Tax Planning* (Y) sebesar 0,942. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara *Corporate Social Responsibility* (X) dengan Beban Pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xz} = \frac{n\sum XZ - \sum X \sum Z}{\sqrt{\left[(n\sum X^2 - (\sum X)^2) \times (\mathrm{n}\sum \mathrm{Z}^2 - (\sum \mathrm{Z})^2)\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6\times(1091602{,}047) - (496.334\times 10000)}{\sqrt{\left[(6\times 42479.0319 - (496.334)^2)\times(6\times 67930290 \quad -(10000)^2\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{(6549612{,}28) - (4963340)}{\sqrt{[(254874{,}1914 - 246347{,}439556)\times(407581740 - 100000000)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{1586272{,}3}{\sqrt{8526{,}751844 \times 307581740}}$$

$$r_{xy} = \frac{1586272{,}3}{1619466{,}939}$$

r_{xy} = 0,981

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara *Corporate Social Responsibility* (X) dengan beban pajak (Z) sebesar 0,981. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara penerapan *Tax Planning* (Y) dengan Beban Pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{YZ} = \frac{n\sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{\left[(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2) \times (n\sum Z^2 - (\sum Z)^2)\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6\times(536183{,}95) - (229{,}35\times 10000)}{\sqrt{\left[(6\times 9245{,}3077 - (229{,}35)^2)\times(6\times 67930290 - (10000)^2\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{(3217103{,}7) - (2293500)}{\sqrt{\left[(55471{,}8462 - 52601{,}4225)\times(407581740 - 100000000)\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{923603{,}7}{\sqrt{2870{,}4237 \times 307581740}}$$

$$r_{xy} = \frac{923603{,}7}{939622{,}2199284338}$$

$$r_{xy} = 0{,}982$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara penerapan *Tax Planning* (Y) dengan Beban Pajak (Z) sebesar 0,982. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.17 diperoleh koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.22
Korelasi Antar Variabel Penelitian

		Corporate Social Responsibility	Tax Planning	Beban Pajak
Corporate Social Responsibility	Pearson Correlation	1	.942**	.981**
	Sig. (2-tailed)		.005	.001
	N	6	6	6
Tax Planning	Pearson Correlation	.942**	1	.982**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000
	N	6	6	6
Beban Pajak	Pearson Correlation	.981**	.982**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	
	N	6	6	6

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara penerapan *Corporate Social Responsibility* (X) dengan penerapan *Tax Planning* (Y) sebesar 0,942 dan masuk dalam kategori sangat kuat. Arah hubungan positif antara penerapan *Corporate Social Responsibility* dengan penerapan *Tax Planning* menunjukkan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* yang baik cenderung diikuti dengan penerapan *Tax Planning* yang baik. Kemudian hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (X) dengan Beban Pajak (Z) sebesar 0,981 juga termasuk dalam kategori sangat kuat, sementara hubungan antara penerapan *Tax Planning* (Y) dengan Beban Pajak (Z) sebesar 0,982 termasuk dalam kategori sangat kuat dengan arah positif.

4.4.2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel *Corporate Social Responsibility* berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan penerapan *Tax Planning* sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Menghitung Koefisien Jalur**

Karena variabel independen hanya satu variabel (*Corporate Social Responsibility*), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

(Pyx) = r_{xy} = (0,942)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS.17 diperoleh koefisien jalur penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* sebagai berikut:

Tabel 4.23
Koefisien jalur CSR terhadap penerapan *Tax Planning*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.621	10.093		1.350	.248
	Corporate Social Responsibility	.488	.087	.942	5.608	.005

a. Dependent Variable: Tax Planning

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,942 pada tabel 4.22 merupakan nilai koefisien jalur penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning*. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* pada perusahaan BUMN.

2. **Menghitung Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi penerapan *Corporate Scial Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\mathrm{Ryx}^2 = (\mathrm{Pyx})^2 = (0{,}942)^2$$
$$= (0{,}887)$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.17 diperoleh koefisien determinasi penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap penerapan *Tax Planning* sebagai berikut:

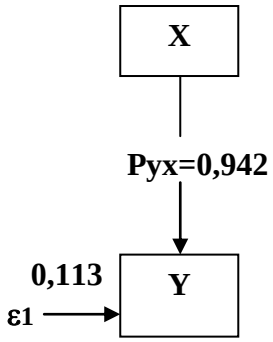
Tabel 4.24
Koefisien determinasi CSR terhadap *Tax Planning*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942[a]	.887	.859	2.90333

a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh sebesar 88,7% terhadap penerapan *Tax Planning* pada perusahaan BUMN, sementara sisanya sebesar 11,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *Corprate social Responsibility*.



Gambar 4.5 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk melakukan pengujian hipotesis analisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Planning* pada Unit BUMN Bandung, maka dilakukan pengujian dengan uji t untuk β_1 dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Planning* pada Unit BUMN Bandung.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Planning* pada Unit BUMN Bandung.

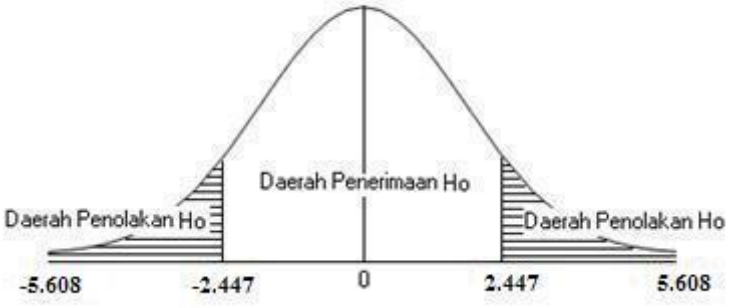
Berdasarkan hasil perhitungan dengan program *SPSS 17 for windows* diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.25

Uji Hipotesis Untuk β_1

Uji Parsial Untuk β_1	t_{tabel}	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Corporate Social Responsibility terhadap *Tax Planning*	5.608	2.447	0.005	H_0 diterima H_1 ditolak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5.608, sedangkan t_{tabel} pada n=6 dan α = 5% yaitu sebesar 2.477. Hal tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} (5.608) > t_{tabel} (2.477). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* signifikan terhadap *Tax Planning* pada Unit BUMN Bandung. Adapun berdasarkan koefisien jalur besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* signifikan terhadap *Tax Planning* pada Unit BUMN Bandung sebesar 88.7%, sedangkan sisanya 11.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya daerah penerimaan dan penolahan H_0, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6

Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 pada Uji Hipotesis untuk β_1

Hasil penelitian M. Ki-Ioiru Rusydi (2009) menyimpulkan bahwa Tax planning dalam program *Corporate Social Responsibility*, dilihat dari persepsi korporasi terhadap *Corporate Social Responsibility*, berdasarkan penelitian PIRAC ada lima persepsi tanggung jawab sosial tersebut. Adanya persepsi atau pandangan tentang *Corporate Social Responsibility* persepsi tanggung jawab sosial tersebut. Adanya persepsi atau pandangan tentang *Corporate Social Responsibility* .yang berbeda-beda membuat timbulnya perilaku-perilaku yang memanfaatkan peluang-peluang aturan perpajakan dalam perencanaan perpajakannya. Adanya perbedaan persepsi tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* membuat korporasi meminta insentif pajak, sedangkan hakikat dari *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen korporasi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya akibat beroperasinya korporasi tersebut.

Korporasi yang menjalankan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*, justru akan mengganggu sustainability dan image korporasi tersebut. Hal ini didasarkan adanya fakta-fakta yang mengungkapkan kasus-kasus di bidang perpajakan yang masuk pada tindak

pidana, walaupun mereka secara umum sudah menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial yang dipublikasikan baik melalui media masa maupun cetak.

4.4.3 Pengujian jalur Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Beban Pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel).

4.4.3.1 Koefisien Jalur

Selanjutnya untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah *Corporate Social Responsibility* (X) dan penerapan *Tax Planning* (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}942 \\ 0{,}942 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara *Corporate Social Responsibility* (X) dan penerapan *Tax Planning* (Y)

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 8{,}878 & -8{,}363 \\ -8{,}363 & 8{,}878 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matriks korelasi antara variabel independen (*Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning*) dengan Beban Pajak.

$$R = \begin{matrix} \\ X \\ Y \end{matrix} \begin{matrix} Z \\ \begin{bmatrix} 0{,}981 \\ 0{,}982 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8{,}878 & -8{,}363 \\ -8{,}363 & 8{,}878 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}981 \\ 0{,}982 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}499 \\ 0{,}513 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel *Corporate Social Responsibillity* sebesar 0,499 dan koefisien jalur variabel Penerapan *Tax Planning* sebesar 0,513. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 17 *for Windows* diperoleh koefisien jalur *Corporate Social Responsibility* dan Penerapan *Tax Planning* terhadap Beban pajak sebagai berikut:

Tabel 4.26
Koefisien jalur *Corporate Social Responsibility* dan Penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17622.613	1021.083		-17.259	.000
	Corporate Social Responsibility	73.991	21.728	.499	3.405	.042
	Tax Planning	146.832	41.930	.513	3.502	.039

a. Dependent Variable: Beban Pajak

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,499 dan 0,513 pada tabel 4.24 merupakan nilai koefisien jalur *Corporate Social Responsibility* dan Penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak.

4.4.3.2 Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan beban pajak.

$$R_{z^2} = [0{,}499\ 0{,}513] \begin{pmatrix} 0{,}981 \\ 0{,}982 \end{pmatrix}$$

$$= 0{,}993$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 17 *for Windows* diperoleh koefisien determinasi *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak sebagai berikut:

Tabel 4.27
Koefisien determinasi *Corporate Social Responsibility* dan Penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak

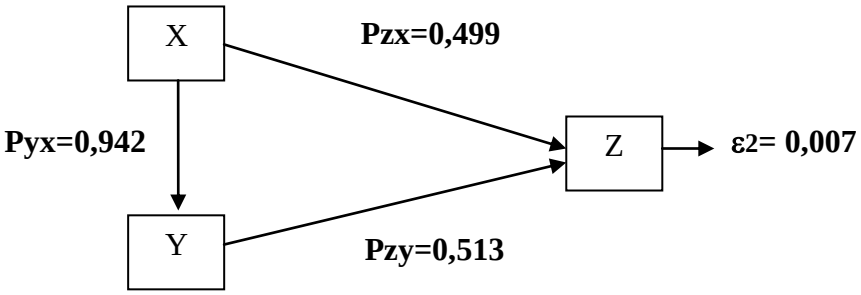
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996[a]	.993	.988	243.47432

a. Predictors: (Constant), Tax Planning, Corporate Social Responsibility

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 99,3% terhadap Beban Pajak pada Perusahaan BUMN. Sisanya sebesar 0,7% merupakan pengaruh faktor lain

diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap Beban Pajak pada Perusahaan BUMN dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.7 Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* sebagai berikut:

Besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Beban Pajak pada perusahaan BUMN:

Pengaruh langsung *Corporate Social Responsibility* terhadap Beban Pajak =

$(P_{ZX})^2$ = (0,499) x (0,499) = 0,249 **(24,9%).**

Pengaruh tidak langsung *Corporate Social Responsibility* terhadap Beban Pajak =

P_{ZX} x r_{XY} x P_{ZY} = (0,499) x (0,942) x (0,513) = 0,241 **(24,1%)**

Jadi total pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Beban Pajak pada perusahaan BUMN **= 24,9% + 24,1% = 49,0%** dengan arah positif. Artinya *Corporate Social Responsibility* yang baik cenderung meningkatkan Beban Pajak.

Besar pengaruh penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak pada perusahaan BUMN:

Pengaruh langsung penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak

$= (P_{ZY})^2 =$ (0,513) x (0,513) = 0,263 **(26,3%)**

Pengaruh tidak langsung penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak

$= P_{ZY} \times r_{XY} \times P_{ZX} =$ (0,513) x (0,942) x (0,499) = 0,241 **(24,1%)**

Jadi total pengaruh penerapan *Tax Planning* terhadap Beban Pajak pada perusahaan BUMN **= 26,3% + 24,1% = 50,4%** dengan arah positif. Artinya Penerapan penerapan *Tax Planning* yang tinggi cenderung meminimalkan Beban Pajak.

4.4.3.3 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* berpengaruh terhadap Beban Pajak baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

1. **Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.**

Untuk melakukan pengujian secara simultan yaitu untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Planning* secara bersama-sama terhadap beban pajak di Unit BUMN di Bandung, maka dilakukan pengujian dengan uji F dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Tidak pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Planning* secara bersama-sama terhadap beban pajak di Unit BUMN di Bandung.

$H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$: pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Planning* secara bersama-sama terhadap beban pajak di Unit BUMN di Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program *SPSS 17 for windows* diperoleh data sebagai berikut :

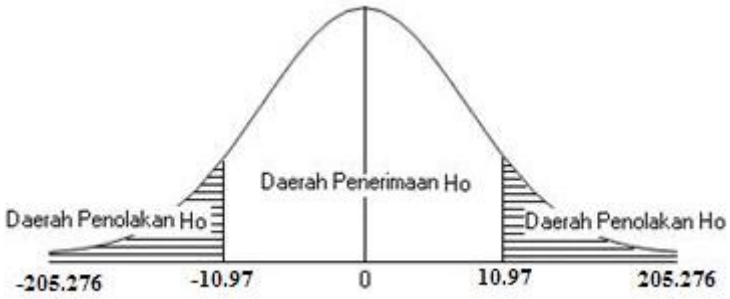
Tabel 4.28

Uji Secara Simultan

Uji Simultan	df	F_{tabel}	F_{hitung}	Sig.	Keterangan
Corporate Social Responsibility dan *Tax Planning* secara bersama-sama terhadap beban pajak	2 3 5	10,97	205,276	0,001	H_0 ditolak H_1 diterima

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai F_{hitung} yaitu sebesar 26.621, sedangkan F_{tabel} pada df1 = 5 dan df2 = 5 dan α = 1% yaitu sebesar 10.97. Hal tersebut menunjukkan bahwa F_{hitung} (205.276) > F_{tabel} (10.97). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima yaitu menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Planning* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap beban pajak di Unit BUMN di Bandung. Adapun berdasarkan koefisien jalur besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Planning* secara bersama-sama terhadap beban pajak di Unit BUMN di Bandung sebesar 75.3%, sedangkan sisanya 24.7% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya daerah peneriman dan penolahan H_0, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.8

Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 pada Uji Hipotesis secara Simultan

Prinsip-prinsip dari CSR yang diterapkan oleh perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak dengan cara perencanaan pajak dan penghindaran pajak, sedangkan dengan penggelapan pajak merupakan cara lain untuk mengurangi pembayaran pajak. Namun, konteks tersebut tidak relevan dengan faktor-faktor dari tanggung jawab sosial karena menyangkut masalah moral dan etika perusahaan (David F Williams, 2007).

Minimalisasi kewajiban merupakan cermin adanya keengganan untuk melaksanakan bakti kepada negara, dimana masih banyak anggapan bahwa pajak merupakan beban bukan sebagai kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannnya baik secara legal maupun tidak legal yaitu:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan, dimana semakin rumit peraturan yang ada, akan menyebabkan adanya kecenderungan untuk menghindari kerumitan tersebut.

2. Besarnya pajak terutang, makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha Wajib Pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi, Wajib Pajak kadang- kadang melakukan negoisasi-negosiasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
4. Resiko deteksi, makin rendah resiko deteksi, Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan.
5. Berat atau ringannya sanksi perpajakan, makin-ringan sanksi atau ketidakadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, maka kecenderungan melanggar akan lebih besar.

Moral masyarakat, ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Indonesia Tax Review, 2003).

2. Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility* dan penerapan *Tax Planning* yang berpengaruh terhadap Beban Pajak.

a. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Beban Pajak

Hipotesis:

Untuk melakukan pengujian hipotesis analisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung, maka dilakukan pengujian dengan uji t untuk β_2 dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung.

$H_1 : \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program *SPSS 17 for windows* diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.29

Uji Hipotesis Untuk β_2

Uji Parsial Untuk β_2	**t_{tabel}**	**t_{hitung}**	**Sig.**	**Keterangan**
Corporate Social Responsibility Terhadap Beban Pajak	2.447	3.405	0.042	H_0 diterima H_1 ditolak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.405, sedangkan t_{tabel} pada n=6 dan α = 5% yaitu sebesar 2.447. Hal tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} (3.405) > t_{tabel} (2.447). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* signifikan terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung. Adapun berdasarkan koefisien jalur besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* signifikan terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung sebesar 49.0%, sedangkan sisanya 51.0% dipengaruhi oleh faktor lain selain *Corporate Social Responsibility*. Untuk lebih jelasnya daerah penerimaan dan penolahan H_0, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.9

Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 pada Uji Hipotesis untuk β_2

Manfaat pajak yang belum diakui dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial lebih besar dari pada perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial memiliki rata-rata saldo manfaat pajak $1,2 juta lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang sadar sosial dam menunjukkan pula posisi pajak yang tidak pasti mengurangi pendapatan kena pajak sekitar $3,4 juta dari perusahaan lain (Luke Watson, 2011).

Corporate Social Responsibility (CSR) diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi. CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan.

b. Pengaruh Penerapan *Tax Planning* Terhadap Beban Pajak Hipotesis:

Untuk melakukan pengujian hipotesis analisis pengaruh *Tax Planning* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung, maka dilakukan pengujian dengan uji t untuk β_3 dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh *Tax Planning* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung.

$H_1 : \beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh *Tax Planning* terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program *SPSS 17 for windows* diperoleh data sebagai berikut :

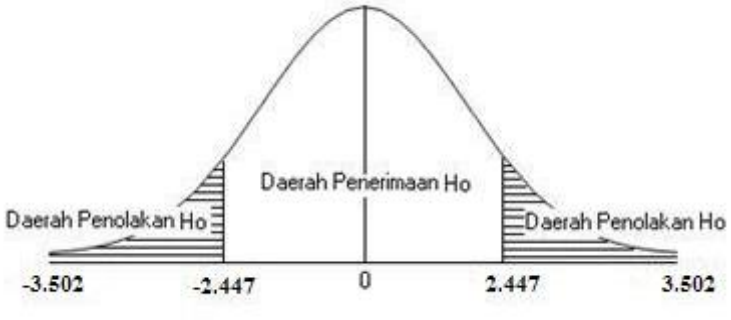
Tabel 4.30

Uji Hipotesis Untuk β_3

Uji Parsial Untuk β_2	t_{tabel}	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Corporate Social Responsibility Terhadap Beban Pajak	2.447	3.502	0.039	H_0 diterima H_1 ditolak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.502, sedangkan t_{tabel} pada n=6 dan α = 5% yaitu sebesar 2.447. Hal tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} (3.502) > t_{tabel} (2.447). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh *Tax Planning* signifikan terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung. Adapun berdasarkan koefisien jalur besarnya pengaruh *tax planning* signifikan terhadap beban pajak pada Unit BUMN Bandung sebesar 50.4%, sedangkan sisanya 49.6% dipengaruhi oleh faktor lain selain *tax planning.* Untuk lebih

jelasnya daerah peneriman dan penolahan H_0, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.10

Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 pada Uji Hipotesis untuk β_3

Hasil ini sesuai dengan penelitian Gloritho yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak untuk biaya *entertainment*, biaya promosi, biaya kesehatan dan biaya kesejahteraan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 22,50%. Selain itu, Soddin Mangunsong (2002) menyimpulkan bahwa *tax planning* berperan dalam mengefisienkan pembayaran pajak

Tax Planning sebenarnya sangat penting bagi perusahaan, karena dapat meminimalisir beban pajak yang harus di bayar. Namun, untuk pelaksanaannya tidaklah mudah, karena banyak ketentuan-ketentuan yang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika sebuah perusahaan memiliki beban pajak yang kecil tetapi laba perusahaannya cukup besar, ada kemungkinan bukan *tax planning* yang baik, tetapi adanya suatu penghindaran pajak atau penyelendupan pajak.